

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Harsono, Boedi, 2012, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Kesatu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum & Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi 2004
- Thoah, Miftah, 2002, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada.

### B. Skripsi/Tesis/Jurnal/Penelitian Terdahulu

- Ignatius Pradipa Probondaru, 2019, "Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah", *Jurnal*, Program Studi Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.

Muchsin, 2007, “Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah: Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Badan Pertanahan Nasional Batam.

Muhammad Safii, 2014, “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Ochky Loedvian Zulkarnain, 2014, “Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.

### **D. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi III tentang Deduktif

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

## **E. Internet**

HukumOnline.com, “PengawasanPPAT”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5991571697d49/BadanPertanahanNasional--majelis-pembin-a-dan-pengawas-ppat-terbentuk-tahun-ini> diakses pada tanggal 20 Maret 2020

PenataanRuang.com, “Tujuan, Strategi dan Kebijakan Rencana Tata RuangWilayahNasional”, <http://www.penataanruang.com/tujuan.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.